

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kualitas laporan keuangan merupakan hasil ringkasan laporan keuangan yang dapat memberikan sebuah informasi keuangan yang bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kualitas menurut Imam Mulyana (2010:96) yaitu kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.

Laporan keuangan menurut Mamduh dan Abdul Halim (2002:63) yaitu laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan.

Laporan keuangan yang dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan didalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur serta dapat mendukung pengambilan keputusan oleh para pemakai. Serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat di bandingkan dengan periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan. (Abdul Hakim, 2017).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Empat karakteristik kualitatif tersebut diantaranya: Relevan, Andal, dapat Dibandingkan dan dapat Dipahami.

Laporan keuangan pemerintah daerah dijadikan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dimana informasi dalam laporan keuangan sesungguhnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi keuangan dari semua kalangan ataupun dalam hal ini kelompok pengguna seperti investor, masyarakat, dan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah tentunya dirancang hanya untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

Baik buruknya kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) harus didukung oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD dilingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Untuk mengetahui baik buruknya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diterapkan pada pemerintahan, itu akan diketahui dari hasil pemeriksaan BPK dimana jika pengendalian internal pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada umumnya telah memadai sedangkan yang opininya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) cukup memadai. Apabila ada pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW) memerlukan perbaikan pengendalian internal dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Salah satu penyebabnya adalah kelemahan didalam Sistem Pengendalian Internal (SPI) pemda. (Tuti Herawati, 2014).

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran didalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dihasilkan oleh BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*”

diantaranya disebabkan oleh kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. (As Syifa Nurillah, Dul Muid, 2014).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Variabel sistem pengendalian internal diukur dengan 5 indikator menurut PP No. 60 Tahun 2008 yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian; 2) Penilaian Resiko; 3) Kegiatan Pengendalian; 4) Informasi dan Komunikasi; 5) Pemantauan. (Abdul Hakim, 2017)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Internal adalah sebagai berikut :

“Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) dimana untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik dibutuhkan sebuah sistem atau prosedur yang baik dalam mendokumentasikan semua transaksi akuntansi untuk diolah menjadi sebuah laporan keuangan yang akan disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Hal tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Permendagri Nomor 13, 2006; 16-17) adalah sebagai berikut: 1) Tertib, 2) Taat pada Peraturan Perundang-undangan, 3) Efektif, 4) Efisien, 5) Ekonomis, 6) Transparan, 7) Bertanggungjawab, 8) Keadilan, 9) Kepatutan, dan 10) Manfaat untuk Masyarakat. Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab. Uraian ini menunjukkan bahwa keuangan daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. (Abdul Hakim, 2017).

Pengertian Akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal (1) menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, pengintrepetasikan atas hasilnya serta penyajian laporan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Fenomena yang terjadi mengenai kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung yaitu, target Kota Bandung untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) belum dapat tercapai tahun ini. Dari Pemeriksaan BPK, hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 Kota Bandung kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penyerahan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD tersebut dilakukan langsung Ketua BPK Jawa Barat Arman Syifa digedung BPK Perwakilan Jawa

Barat, Jalan Moh. Toha, Senin (12/6). Hasil pemeriksaan kami untuk laporan keuangan Pemkot Bandung tahun 2016 kami masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ada beberapa hal yang kami nilai masih cukup material untuk kami jadikan sebagai pengecualian dalam opini BPK, "Ujar Arman kepada wartawan.

Menurut Arman, salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas. Pada pemeriksaan tahun lalu, BPK menetapkan ada sejumlah aset senilai Rp 11 triliun yang harus didata ulang. "Masalah sertifikat aset ada satu penilaian tahun lalu kita permasalahan tidak sesuai prinsip standar akuntansi senilai Rp 11 triliun. Yang kita nilai tidak sesuai standar, yang kemudian ditindak lanjuti Pemda. Rp 9 triliun sudah bisa direvaluasi, dinilai kembali sesuai dengan NJOP sesuai dengan tahun neraca awal, sisanya Rp 2,5 triliun masih belum selesai. Yang lain masih ada aset yang tidak jelas ditemukan keterangan yang memadai aset itu ada dimana," katanya.

Selain itu lanjut Arman ada juga masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan Pemkot Bandung seperti terkait piutang pajak dan persediaan utang jangka pendek. Namun demikian kata dia, pihaknya mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Bandung untuk memperbaiki laporan keuangan tahun 2016. Pencapaian tersebut jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.

"Terkait aset, ada inventarisasi yang menyeluruh tentang aset, perbaikan sistemnya dan pencatatan laporan. Itu harus segera dilaporkan sehingga akhir tahun ini kita bisa lakukan inventarisasi secara menyeluruh untuk aset. Terkait utang dan piutang harus betul-betul ada konfirmasi, hingga diakhir tahun

semuanya sudah confirm itulah kondisi sebenarnya. Kita apresiasi perbaikan namun ada beberapa hal yang masih menyisakan masalah, "ungkapnya. Di tempat yang sama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui jika masih ada warisan masalah aset-aset yang harus dituntaskan. Pria yang akrab disapa Emil ini menyebut, pihaknya hanya butuh lebih banyak waktu.

"Karena reformasi birokrasinya kan sudah bagus semua, kecuali (WDP) ini. Kalau tahun depan berhasil, di sisa yang babak final ini insya Allah Saya punya warisan reformasi birokrasi yang lengkap, "Katanya. Selain persoalan aset, faktor piutang pajak juga masih menjadi beban pemerintah kota. Utamanya karena ada beberapa penyewa lahan pemerintah dan penunggak pajak yang belum menuntaskan kewajibannya. "Tadi rekomendasi agar ada sinkronisasi tim. Timnya bisa memastikan tidak hanya data ada, tetapi juga mereka yang berutang itu juga memahami untuk segera menyelesaikan utangnya, "Ucapnya. Dia menargetkan, Kota Bandung dapat meraih opini WTP pada tahun 2018 mendatang. "Beri kami waktu insya Allah sampai. Isunya memang lebih ke waktu yang memadai yang 1 tahun menertibkan yang sebanyak itu. Karena ada yang digugat ke pengadilan, ada penyewa tadi tiba-tiba jadi pemilik dapat sertifikat. Itu kan rumit hal-hal begini, "Pungkasnya. (Eko, 2017).

Fenomena selanjutnya yaitu terjadi pada tahun 2015 dimana BPK-RI menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung yang ditemukan oleh BPK. Adapun temuan tersebut adalah Penyampaian SPTPD pada Minimal Enam Hotel

Tidak Berdasar Transaksi Yang Sebenarnya dan Terdapat Kekurangan Penerimaan Pajak Hotel Minimal Sebesar Rp379.696.072,50, Kekurangan Penerimaan Pajak Reklame Sebesar Rp1.490.053.385,00. Mekanisme Penerbitan NPA dan SKPD Pajak Air Tanah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kekurangan Penerimaan Pajak Air Tanah Sebesar Rp184.524.168,94, Potensi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Sebesar Rp1.899.292.437,00 atas Minimal 734 Menara Belum Dikenakan.

Pemerintah Kota Bandung Kehilangan Kesempatan Memperoleh Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Tanah dan Mesjid Pusdai. Pengelolaan atas Pendapatan Retribusi Sarana Olahraga (SOR) dan Gelanggang Olahraga (GOR) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tidak Tertib. Penyajian Nilai Piutang Retribusi Pemakaman sebesar Rp2.260.711.000,00 Belum Menggambarkan Keadaan yang sebenarnya, Penatausahaan Piutang Pajak Daerah Tidak Tertib Saldo Piutang Sewa Tanah dan Bangunan sebesar Rp22.927.858.186,00 dan Denda Sewa Tanah atau Bangunan sebesar Rp 5.328.064.007,00 Belum Menggambarkan Keadaan Sebenarnya.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2014 Tidak Menggambarkan Nilai yang sebenarnya, Pemantauan dan Penagihan atas Dana Bergulir Program Barokah GMT Tidak Dilakukan, Penatausahaan Aset Tetap Milik Pemerintah Kota Bandung Belum Tertib. Barang Milik Daerah Minimal sebesar Rp1.237.920.000,00 Berupa Kendaraan Dinas Digunakan Pegawai yang Sudah Tidak Berhak, Penyajian Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp184.563.602.832,00 Belum Menggambarkan Nilai yang Sebenarnya.

Penyajian Dana Talangan Kepada CV Usaha Mandiri Pedagang Kaki Lima Pada Akun Aset Lain-lainya Tidak Tepat dan 16. Pemerintah Kota Bandung Belum Sepenuhnya Mempersiapkan Penerapan SAP Berbasis Akruar pada Tahun 2015. (MAS, 2015).

Berikutnya fenomena yang dimukan pada tahun 2013 yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk lebih serius memperbaiki pengelolaan aset di wilayah Kota Bandung. Sudah enam tahun belakangan, persoalan aset selalu menjadi kendala utama bagi Kota Bandung untuk mendapatkan opini penilaian keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kota Bandung mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2012 yang diberikan BPK RI akhir perkan lalu. Ada empat catatan yang diberikan, yaitu persoalan aset, kelemahan pengendalian sistem internal penatausahaan piutang dan pertanggungjawaban, pengendalian sistem internal sewa tanah dan bangunan, serta hibah bansos. “Setiap tahun persoalan aset selalu menjadi temuan, kenapa hal itu tidak juga bisa dituntaskan sampai sekarang?” kata Pelaksana Badan Anggaran DPRD Kota Bandung Tomtom Dabbul Qomar, ketika ditemui di sela-sela diskusi politik di Aula Redaksi Pikiran Rakyat Jln. Soekarno Hatta no. 147 Bandung, Selasa (4/6/2013).

Tomtom menyebutkan, seharusnya waktu enam tahun dianggap sudah lebih cukup untuk menyelesaikan segala persoalan aset, mulai dari identifikasi aset, pendataan, investigasi, hingga sertifikasi aset. Bahkan upaya yang dilakukan

dengan menggabungkan Dinas Keuangan dan Dinas Aset menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk mengefektifkan mekanisme pencatatan aset pun dinilai belum berjalan optimal. “Penggabungan dua SKPD itu juga salah satunya dilakukan agar perbaikan pengelolaan aset bisa lebih dilakukan secara fokus, tapi tampaknya target itu belum berjalan optimal,” tuturnya. Dia mengakui, selama beberapa tahun terakhir Komisi A dan Badan Anggaran banyak menerima surat keluhan dan pengaduan dari masyarakat mengenai aset. Mayoritas mengenai kepemilikan status dan persoalan ganti rugi. “Artinya persoalan mengenai aset ini memang masih terus carut marut, dan ini sangat dirasakan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya.

Tomtom juga mengatakan, gugatan dari masyarakat juga banyak dilayangkan kepada Pemkot Kota Bandung mengenai persoalan aset. Banyak juga persoalan mengenai aset yang hilang, atau aset yang disewakan tapi nilai PAD yang masuk ke kas daerah tidak sebanding dengan objek yang disewakan. “Permasalahan seperti itu harus dipecahkan secara serius, segera lakukan penelusuran dan investigasi agar bisa selesai,” kata Tomtom. (Pikiran Rakyat, 2013).

Dilihat dari fenomena di atas, Pemerintah Kota Bandung belum optimal dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik ditinjau dari kualitasnya, dimana BPK banyak menemukan kasus tidak kesesuaian laporan keuangan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan hal tersebut berkaitan dengan relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan dalam baik buruknya sebuah laporan keuangan. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan

penelitian tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada dasarnya dalam penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh banyak indikator penting. Hal tersebut memiliki peranan masing-masing yang saling berkaitan untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang reliable. Beberapa indikator yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan diantaranya, Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hakim (2017) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Abdul Hakim adalah variabel, lokasi penelitian dan tahun penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hakim berpengaruh positif karena semakin baik Kompetensi Sumber Daya Manusia maka akan meningkatkan Mutu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, semakin baik Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka akan meningkatkan Mutu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan semakin baik Sistem Pengendalian Internal yang dijalankan oleh pemerintah maka akan meningkatkan Mutu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai sistem informasi akuntansi dan menuangkannya ke dalam laporan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan**

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Pemerintah Kota Bandung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Seberapa besar Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah ditetapkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini memilih tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam hal kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung (PEMKOT) melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) serta meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah mengenai masalah Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah serta meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

3. Bagi Instansi Pendidikan

Masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Pemerintah Kota Bandung yang beralamat di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, dan waktu yang di ambil adalah bulan Maret sampai dengan September 2018.